



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

LKPJ
TAHUN 2019



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang

DAFTAR ISI

I.	PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
	A. Capaian Pelaksanaan Program.....	1
	B. Outcome Program.....	29
	C. Capaian Indikator Kinerja Daerah.....	43
	D. Permasalahan dan Solusi	43
	E. Penghargaan Nasional yang Diterima	44
	F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018	44
II.	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI	
	A. Tugas Pembantuan yang Diterima	
	1. Dasar Hukum	48
	2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	48
	3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan	48
	4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya	48
	5. Sumber dan Jumlah Anggaran	48
	6. Permasalahan dan Solusi	49
	B. Tugas Dekonsentrasi yang Diterima	
	1. Dasar Hukum	50
	2. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi	50
	3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan	50
	4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya	51
	5. Sumber dan Jumlah Anggaran	51
	6. Permasalahan dan Solusi	53
III.	PENUTUP	
	1. Kesimpulan	54
	2. Saran	54

BAB I

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kewenangan dan arah kebijakan umum pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021, kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup pada 15 (lima belas) program, yang terdiri atas 5 program rutin dan 10 program wajib urusan sosial.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yang dipergunakan untuk memenuhi belanja pelayanan perkantoran selama 1 tahun. Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor;

- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
- 12) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;
- 13) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Mencakup 13 (tiga belas) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Meubeleur;
- 2) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi;
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan;
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- 10) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 11) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen dan Bangunan Sejarah.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini berisikan satu kegiatan, yakni Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk PNS Dinas Sosial dan UPTD

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini berisi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya

Aparatur Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yakni Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
- 2) Penatausahaan Keuangan SKPD;
- 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;
- 5) Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota;
- 6) Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD.

f) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bimbingan Teknis Satuan Bakti Pekerja Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagai pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang Sakti Peksos dari Kab/ Kota.

- 2) Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)

Tujuan kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan dinas terkait pada kabupaten/kota dan lembaga kemasyarakatan terkait tentang Unit Institusi Layanan Sosial (UILS); terwujudnya hak penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan dan bimbingan sosial, ekonomi dan budaya, sesuai dengan anamat Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas; terwujudnya kepedulian, kesempatan dan peluang bagi pemerintah, pemerintah daerah, profesi pekerjaan sosial dan berbagai profesi yang relevan serta masyarakat luas dalam pengembangan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental; terwujudnya pemahaman masyarakat tentang permasalahan penyandang disabilitas mental, termasuk upaya deteksi dini dan penanganannya berbasis masyarakat. Jumlah peserta kegiatan ini adalah 60 orang.

- 3) Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Adapun bentuk kegiatan yaitu Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa pemberian rujukan terhadap penyandang masalah

kesejahteraan sosial se-Sumatera Barat yang dikirim ke Panti Sosial yang berada di Provinsi Bengkulu guna menjalani rehabilitasi dan pembinaan.

- 4) Sosialisasi Program Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang menjadi korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH adapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta.

g) Program Pembinaan Anak Terlantar

Anak Terlantar merupakan penyebab dominan dari ketidakmampuan orang tua yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu, akibat orang tua/dan/atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan pelbagai alasan menjadikan anak-anak mereka terlantar. Dikategorikan anak terlantar apabila :

- 1) Seseorang berusia 5 – 18 tahun;
- 2) Anak yatim, piatu, yatim piatu maupun masih mempunyai kedua orang tua;
- 3) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- 4) Anak yang lahir karena pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan.

Adapun kegiatan pada Program ini sebagai berikut :

- 1) Biaya Pendidikan Klien (PSAA Tri Murni);
Pengadaan biaya pendidikan bagi 100 orang anak perempuan klien PSAA Tri Murni terdiri dari belanja peralatan/ perlengkapan, uang sekolah klien dan uang saku klien. Biaya pendidikan dimaksudkan agar kebutuhan pendidikan untuk 1 tahun terpenuhi.

2) Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah wadah koordinasi lintas instansi secara terpadu dan komprehensif untuk memberikan verifikasi terhadap anak yang akan dijadikan anak angkat oleh calon orang tua angkat dan agar terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pengangkatan anak. Sasaran kegiatan ini adalah 25 orang.

3) Pengadaan Kelengkapan Klien;

Pengadaan kelengkapan klien pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni, dan PSBR Harapan Padang Panjang sejumlah 455 orang klien terdiri dari 155 orang anak laki-laki dan 300 orang anak perempuan. Kegiatan ini untuk membiayai kebutuhan harian, kebutuhan pakaian sekolah dan penyediaan kebutuhan materi (uang jajan dan uang saku) bagi anak asuh serta anak yang mendapatkan pelayanan keterampilan.

4) Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, telah dilaksanakan selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan Padang Panjang, adapun obat-obatan yang disediakan adalah obat-obatan ringan beserta masing-masing seorang tenaga medis.

5) Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);

Kegiatan ini dimaksudkan agar anak terlantar laki-laki kurang mampu yang putus sekolah dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat hidup mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun untuk 2 angkatan (160 orang) dengan masing-masing angkatan berjumlah 80 orang terdiri dari:

- Jurusan Otomotif = 40 orang
- Jurusan elektronika = 40 orang
- Jurusan Las Karbit/Listrik = 40 orang
- Jurusan Instalasi Listrik = 40 orang

6) Seleksi Penerimaan Calon Klien;

Seleksi penerimaan calon klien dimaksudkan agar klien yang akan diterima pada Panti Sosial PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni, dan

PSBR Harapan Padang Panjang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap 65 orang anak.

7) Penyediaan Bahan Pendidikan;

Penyediaan bahan pendidikan bagi klien PSABR Budi Utama Lubuk Alung, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak asuh sebanyak 75 orang anak selama 1 tahun.

8) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);

Pendidikan dan pelatihan anak asuh bagi 75 orang klien PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dimaksudkan agar anak asuh yang dibina dan dilayani mendapatkan peningkatan pendidikan yang lebih baik dan mendapat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri sebagai bekal setelah dari Panti Sosial.

9) Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;

Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak, bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak khususnya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK), serta untuk terjalinnya koordinasi antar pengurus panti sosial swasta dengan petugas Dinas Sosial Kab/Kota. Sasaran pada kegiatan ini berjumlah 125 orang.

10) Pengadaan Makanan dan Minuman;

Pengadaan makanan dan minuman (biaya makan klien) selama 1 tahun pada PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 455 orang terdiri dari 155 orang laki-laki, 300 orang perempuan.

11) Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);

Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Bagi Anak Terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang, dimaksudkan agar anak terlantar perempuan kurang mampu yang putus sekolah terpenuhi kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan/ keahlian sehingga dapat hidup mandiri dengan norma dan etika. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 tahun

untuk 2 angkatan (200 orang anak perempuan) dengan masing-masing angkatan berjumlah 100 orang terdiri dari :

- Jurusan Kostum
- Jurusan Bordir

12) Sehari Bersama Anak;

Sehari Bersama Anak, adalah perwujudan dari Keppres Nomor 4 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional seiring dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2019 merupakan momentum yang tepat untuk menggugah dan membangkitkan segenap komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua) akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pemenuhan layanan perlindungan dan kesejahteraannya. Untuk tahun anggaran 2019 jumlah sasaran kegiatan ini sebanyak 200 orang.

Tujuan umum peringatan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta bersama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan upaya pembinaan dan pengembangan anak secara integratif holistik dan berkesinambungan serta meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua dan segenap komponen bangsa untuk memenuhi hak-hak anak berdasarkan *Child Right*, dan menghindari anak-anak dari penyiksaan, penelantaran, eksploitasi kekerasan terhadap anak, diskriminasi, pemakaian obat-obatan terlarang, pornografi, dan lain-lain.

13) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAA Tri Murni);

Pendidikan dan pelatihan bagi 100 orang anak perempuan klien PSAA Tri Murni dimaksudkan agar anak asuh yang dibina dan dilayani mendapatkan peningkatan pendidikan yang lebih baik dan mendapat pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas diri sebagai bekal setelah dari Panti Sosial.

h) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

Penyandang cacat (disabilitas) adalah seseorang yang mengalami hambatan fisik mental atau fisik dan mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan

mental. Pembinaan para panyandang cacat dilaksanakan secara sistem panti dengan tujuan agar dapat menjamin dan melindungi penyandang disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan dan dokter pakai habis, pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 150 orang anak berupa penyediaan obat-obatan ringan serta penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk oleh Puskesmas setempat.

2) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK).

Salah satu upaya rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan program pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas melalui dua pendekatan, yaitu melalui program pelayanan dalam panti dan program pelayanan luar panti. Kedua program ini berjalan secara beriringan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Penyandang Disabilitas. Rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas melalui Loka Bina Karya pada tahun 2019 diberikan kepada 15 orang peserta.

3) Biaya Kelengkapan Klien;

Biaya kelengkapan klien pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang dengan jumlah kelayan 150 orang anak untuk 1 tahun, biaya kelengkapan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian kelayan, kebutuhan praktek dan penyediaan kebutuhan ekstra kurikuler (olahraga, kesenian, pramuka).

4) Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas;

Kegiatan ini merupakan apresiasi terhadap masyarakat yang peduli terhadap keberadaan para penyandang disabilitas. Pada tahun ini diberikan penghargaan kepada 54 orang tokoh masyarakat.

5) Pendaaygunaan para Penyandang Disabilitas;

Pendayagunaan para penyandang disabilitas yang dilaksanakan di PSBG Harapan Ibu Padang kepada 100 orang klien (50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan) selama 1 tahun, salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sosial, fisik, mental dan keterampilan bagi anak retardasi mental yang mampu didik dan mampu latih sehingga mereka bisa hidup mandiri di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, disamping itu sasaran kegiatan ini juga bagi orang tua kelayan agar mereka dapat melanjutkan proses pelayanan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut sebagai upaya dan rasa tanggungjawab keluarga.

6) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas;

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma, dilaksanakan selama 1 tahun di Panti Sosial Bina Netera “Tuah Sakato” Padang untuk klien yang berjumlah 50 orang (36 laki-laki dan 14 perempuan), tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membina dan memperbaiki sikap mental para penyandang cacat netra dari sifat konsumtif kepada sifat produktif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang cacat netra sebagai modal dasar dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat serta untuk terbina dan terentasnya penyandang cacat netra sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari.

Pelatihan yang diberikan berupa pembinaan KUBE dengan memberikan bimbingan, metode dan teknis pelayanan prima kepada pasien serta pembinaan pengelolaan klinik pijat dan pengadministrasian keuangan yang baik.

7) Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.

Penguatan motivasi penyandang disabilitas bertujuan untuk memberikan motivasi sosial bagi masyarakat terhadap penyandang disabilitas dengan jumlah sasaran 150 orang.

8) Bimbingan Sosial bagi PSM/ TKSK;

Bimbingan Sosial ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada 68 orang pendamping agar petugas dari kabupaten/ kota selaku petugas pelaksana dan pendamping memahami tentang

kriteria penerima bantuan dan tatacara pendampingan terhadap penerima bantuan jaminan sosial/ asistensi sosial terhadap penyandang disabilitas berat.

9) Biaya Makan dan Minum Klien;

Biaya makanan dan minuman klien yang dilaksanakan selama 1 tahun pada PSBG Harapan Ibu Padang dan PSBN Tuah Sakato Padang, dengan jumlah klien 150 orang terdiri dari 92 orang laki-laki dan 58 orang perempuan.

i) Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar

Panti asuhan lansia adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat (Kepmensos No. 50/HUK/2004).

Adapun kegiatan program ini sebagai berikut :

1) Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;

Penyediaan bahan obat-obatan Jompo, dilaksanakan selama 1 tahun pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak 180 orang. Adapun obat-obat yang disediakan berupa obat-obatan ringan dan penyediaan seorang tenaga medis yang ditunjuk.

2) Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;

Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar selama 1 tahun, yang dipergunakan untuk biaya penguburan dan pemulangan kelayan kepada keluarganya setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam panti.

3) Lanjut Usia Berkreasi.

Lanjut Usia Berkreasi bertujuan:

- a) Untuk melembaganya nilai-nilai masyarakat agar selalu menghargai keberadaan lanjut usia.
- b) Meningkatnya kesadaran para lanjut usia, keluarga dan masyarakat akan arti pentingnya makna kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai kegiatan terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial.

- c) Termotivasinya dan Bergeraknya lanjut usia, keluarga, organisasi sosial, masyarakat dan dunia usaha dan upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dengan mengembangkan jiwa dan semangat kebersamaan keluarga lanjut usia.
- d) Adapun sasaran kegiatan ini sejumlah 250 orang.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;
Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti jompo, di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dengan jumlah klien 180 orang (106 orang laki-laki dan 74 orang perempuan). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan kesenian kepada para lanjut usia terlantar agar mereka dapat menjalani hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat serta untuk menumbuhkan rasa percaya diri.
- 5) Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;
Biaya kelengkapan klien panti jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian serta memenuhi bahan pelatihan kelayan lanjut usia, dengan tujuan agar lanjut usia terlantar dapat mengisi hari-hari tuanya dengan kegiatan yang bermanfaat, dilaksanakan selama 1 tahun untuk 180 orang klien terdiri dari 106 orang laki-laki dan 74 orang perempuan.
- 6) Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;
Biaya makan dan minum kelayan Jompo, pada PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar, berjumlah 110 orang di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan 70 orang di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar yang dilaksanakan selama 1 tahun.

j) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kelengkapan Klien;
Pengadaan kelengkapan (biaya klien) dilaksanakan selama 1 tahun untuk di PSKW Andam Dewi Sukarami Solok yang berjumlah 40 orang, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian klien.

- 2) Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;
Biaya obat-obatan, dilaksanakan selama 1 tahun pada PSKW Andam Dewi dengan penyediaan obat-obatan ringan serta tenaga medis, banyaknya sasaran kegiatan ini 40 orang klien.
- 3) Pengadaan Makanan dan Minuman;
Pengadaan makanan dan minuman pada PSKW Andam Dewi Sukarumi Solok selama 1 tahun untuk 40 orang.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;
Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyakit sosial pada PSKW Andam Dewi Solok, kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif eks Wanita Tuna Susila sehingga mereka mau dan mampu melakukan fungsi dan peran sosialnya secara wajar serta meningkatkan ketahanan sosial warga binaan terhadap pengaruh buruk lingkungan dengan memberikan bekal agama dan norma etika sehingga warga binaan dapat menjalankan kehidupan dengan baik sesuai dengan kaidah agama dan etika.

k) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial merupakan Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Adapun kegiatan program ini sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;
Sasaran kegiatan ini sejumlah 1.811 orang dengan tujuan membekali kemampuan dan keberfungsian Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.
- 2) Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;
Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tk. Sumatera Barat bertujuan :

- a) Untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja PSKS dalam mengemban misi dan kontribusi bidang pengembangan kesejahteraan sosial di lapangan;
- b) Melihat sejauh mana dedikasi dan prestasi pada PSKS dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- c) Untuk menentukan PSKS yang berprestasi Tk. Sumatera Barat.

Sasaran kegiatan ini berjumlah 32 orang.

- 3) Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini bertujuan agar PSM se-Sumatera Barat saling berbagi pengalaman dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta solusi bagi mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dimana kegiatan ini diikuti oleh 50 orang.

- 4) Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat;

Sasaran kegiatan ini sejumlah 50 orang dengan tujuan membekali kemampuan para TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

- 5) KSN Expo dan Award dalam HKSAN;

KSN Expo dan Award Dalam HKSAN, bertujuan sebagai media publikasi dan promosi berbagai pihak, instansi pemerintah, dunia usaha, organisasi non pemerintah/LSM, dunia pendidikan dan pelaku usaha lain yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk upaya menuju Indonesia sejahtera.

- 6) Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini diikuti oleh 165 orang PSM se-Sumatera Barat.

- 7) Penguatan Nilai-Nilai KSN;

Penguatan Nilai-nilai KSN tahun 2019, yang jatuh pada tanggal 20 Desember setiap tahunnya merupakan momentum untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial untuk didayagunakan sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku

sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mendayagunakan peran aktif masyarakat luas khususnya masyarakat mampu secara melembaga dan berkelanjutan untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan sosial. Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pertandingan olah raga yang diikuti oleh 800 orang peserta dengan tema “Kesetiakawanan Sosial Menembus Batas.”

- 8) Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos sejumlah 50 orang di bidang administrasi manajemen orsos dan bidang pelayanan sosial. Tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengurus LKS/Orsos dalam pengelolaan manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b) Meningkatnya kinerja LKS/Orsos dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju kemandirian;
- c) Terwujudnya administrasi LKS/Orsos dengan baik; dan
- d) Terhimpunnya LKS/Orsos yang di akreditasi dan diusulkan pada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta.

- 9) Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanggulangi masalah sosial seperti kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan mampu menyelesaikan masalah sosial di lingkungannya sendiri secara bersama-sama, dan bahkan diharapkan dapat secara bersama-sama pula mengembangkan potensi diri sehingga dapat diwujudkan masyarakat maju dan berkembang. Jumlah sasaran sebanyak 640 orang.

- 10) Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;

Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Sosial (LKKS) se-Sumatera Barat bertujuan memberikan motivasi kepada pengurus LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membina dan

mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran kegiatan sejumlah 180 orang pengurus.

11) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;

Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, komunikasi, inovasi dan edukasi melalui media cetak, media elektronik dan televisi terhadap kelompok sasaran ke arah yang lebih baik serta untuk terwujudnya pemahaman yang sama kepada para pelaku program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan penyuluhan sosial guna mendukung keberhasilan program-program dari kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran kegiatan ini berjumlah 3.260 orang.

12) Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi pengurus Karang Taruna di Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

13) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat;

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini diikuti oleh 685 orang PSM se-Sumatera Barat.

14) Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Koordinasi dilaksanakan dengan 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk menguatkan Jejaring Kerja Lembaga kesejahteraan sosial dan temu koordinasi kesejahteraan sosial yang diikuti oleh 180 orang peserta.

15) Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;

Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus orsos dalam mengelola manajemen kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja orsos dalam melaksanakan tugas dan fungsi menuju kemandirian serta mewujudkan administrasi orsos dengan baik. Sasaran kegiatan ini berjumlah 50 orang.

m) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (PKAT) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan terhadap mereka yang masih belum tersentuh proses Pembangunan Nasional yang umumnya berada pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Fokus perhatian Pemberdayaan KAT adalah mereka yang berada di daerah terpencil baik secara geografis, sosial budaya, ekonomi maupun politik. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam Pemberdayaan KAT berupa:
 - 1) Penjajagan Awal, tujuannya adalah untuk (1) menemukan sekaligus menghimpun data etnologi KAT dalam suatu wilayah untuk mendapatkan data awal tentang Komunitas Adat Terpencil, (2) Menghimpun data potensi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia, dan (3) Menetapkan katagori Komunitas Adat terpencil sesuai dengan kriteria dan kenyataan di lapangan.
 - 2) Semiloka Daerah Hasil Studi Kelayakan bertujuan untuk memperoleh masukan bentuk kegiatan Pemberdayaan KAT dan dukungan keterpaduan program dari Dinas/Instansi terkait serta masyarakat maupun Perguruan Tinggi sebagai acuan pelaksanaan pemberdayaan selanjutnya serta membahas kelayakan lokasi sebagai suatu calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Sumatera Barat tahun 2019.
- b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang efektif, efisien, dan inovatif. Hal ini sangat esensial karena berhubungan dengan pelayanan publik. Hal yang diharapkan dari kegiatan ini adalah didapatkannya gambaran tentang tingkat kepuasan dan pendapat masyarakat atas pelayanan kesejahteraan sosial yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maka pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah masuk dalam kategori mutu pelayanan B atau Baik.

c. Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dan memverifikasi tokoh yang akan diusulkan untuk diberi gelar calon pahlawan nasional. Pengkajian melibatkan perguruan tinggi dan akademisi/ sejarawan. Calon yang diusulkan berjumlah 3 orang.

d. Pelayanan Orang Terlantar;

Kegiatan ini dialokasikan untuk pemulangan orang terlantar sejumlah 38 orang dalam 1 tahun anggaran.

e. Sumatera Barat Expo 2019 (Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial)

Kegiatan ini dilakukan untuk mempublikasi kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun ini kegiatan diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara.

f. Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota;

Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab/Kota dan LK3 Berbasis Masyarakat agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai tempat layanan informasi, konsultasi rujukan dalam penanganan permasalahan keluarga sesuai dengan kebutuhan, serta sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Sosial dari segi mana LK3 masih memiliki kelemahan / kendala dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat dijadikan bahan penyusunan program serta langkah-langkah Pemberdayaan Keluarga selanjutnya. Sasaran kegiatan ini sebanyak 50 orang pengurus LK3.

g. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil;

Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil, dilaksanakan dalam rangka menciptakan warga dampingan dan petugas pendamping serta masyarakat eks warga yang terampil mandiri, dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan

memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kebun dan tanaman masyarakat tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 30 KK warga KAT.

h. Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS

Kegiatan ini diikuti oleh 96 orang TKSK dari Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar petugas pendata dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendataan PMKS yang ada di Sumatera Barat.

i. Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)

Sosialisasi dilaksanakan pada petugas yang menangani UGD pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat bertujuan meningkatkan pemahaman tentang UGB dengan jumlah sasaran 25 orang.

j. Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);

Bimbingan keterampilan bagi keluarga rentan dan WRSE di Sumatera Barat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen usaha keluarga (KK) rentan miskin dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Kegiatan ini diikuti oleh 15.890 orang.

k. Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dokumentasi tentang populasi PMKS dan PSKS yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai bahan masukan untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan.

n) Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

a. Bantuan Logistik Bencana;

Kegiatan ini berupa penyediaan logistik bencana yang didistribusikan kepada Dinas Sosial Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam bentuk baper stock.

b. Rakor Bencana Sosial

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi ASN dan masyarakat dalam menangani bencana sosial yang terjadi. Kegiatan ini diikuti oleh 59 orang peserta.

- c. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ASN dan masyarakat dalam menyusun laporan logistik bencana sosial. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang peserta.
- d. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ASN dan masyarakat dalam menyusun laporan logistik bencana alam. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang peserta.
- e. Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan;
Program Keluarga harapan (PKH) adalah program bantuan social bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki kondisional kesehatan dan pendidikan. Kegiatan PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam hidup sehat dan pendidikan berkelanjutan, dan mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat miskin.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya koordinasi pendamping dan operator PKH di Kab/Kota sejumlah 35 orang.
- f. Pemantapan Tim Psikososial Korban Bencana Alam;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim Psikososial Korban bencana Alam sejumlah 50 orang.
- g. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim TRC Bencana Alam sejumlah 50 orang. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam;
- h. Sinergitas Program Keluarga Harapan;
Kegiatan ini diikuti oleh 76 orang koordinator pendamping PKH dan operator Kab/Kota se-Sumatera Barat.
- i. Peningkatan Capacity Building Program Keluarga Harapan;
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendamping dan operator PKH di Kab/Kota sejumlah 76 orang

o) Program Pemberdayaan Fakir Miskin

- a. Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT
Kegiatan ini diikuti oleh 57 orang petugas verifikasi dan validasi BDT dari Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar petugas dapat meningkatkan akurasi dalam melakukan Verifikasi dan Validasi BDT yang ada di Sumatera Barat.
- b. Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se-Sumatera Barat;
Pengadaan Beras Untuk Panti Sosial Swasta bertujuan membantu Panti Sosial swasta dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di dalam Panti dengan jumlah penerima sejumlah 4.000 orang.
- c. Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai
Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar pendamping dapat melakukan pendampingan dalam penyaluran BPNT di Sumatera Barat.
- d. Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi;
Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi, merupakan media untuk meningkatkan motivasi pendamping dan warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya sosial dan ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak. Tujuan dari kegiatan ini adalah:
 - a) Untuk mewujudkan penilaian yang obyektif dan partisipatif untuk memungkinkan terjalannya pengalaman, prestasi dalam pengelolaan KUBE FM, serta pendamping berprestasi.
 - b) Mwujudkan media tukar pengalaman antar pengurus KUBE, serta pendamping secara kondusif yang dapat menggambarkan perkembangan dan dinamika KUBE serta pendamping.
 - c) Mwujudkan kompetisi sehat, spontan dan menjunjung nilai –nilai kebersamaan dalam berprestasi.

- d) Terjalannya KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat untuk diikutsertakan pada seleksi tingkat Nasional tahun 2019.
- e) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat fakir miskin yang menjadi anggota kelompok KUBE.
- e. Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM;
Bantuan pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan fakir miskin tentang elektronik warung gotong royong (E-Warong). Fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat. Pada tahun ini sasaran kegiatan berjumlah 8 kelompok
- f. Penumbuhan/Pengembangan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

KUBE FM adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi satu sama lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan meningkatkan produktivitas anggotanya. Bantuan ini diberikan kepada 7 kelompok di Kota Solok, 140 kelompok di Kabupaten Pasaman, dan 20 kelompok di Kabupaten Pasaman.

- g. Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Rastra
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau rastra adalah program bantuan pangan untuk masyarakat miskin dengan nilai bantuan Rp110.000 per bulan. Penyaluran bantuan kepada penerima yang berdasarkan basis data

terpadu (BDT) melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Rapat monitoring ini diikuti oleh 50 orang peserta.

- h. Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan;

Kegiatan ini dilaksanakan agar KUBE yang diberikan bantuan stimulan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota KUBE. Sasaran sejumlah 730 kk/ 73 kelompok usaha bersama yang berlokasi di Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Tanah Datar.

- i. Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan;
Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang Pendamping KUBE Pedesaan.
- j. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT Kab/Kota
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau rastra diberikan kepada masyarakat miskin sesuai Basis Data Terpadu (BDT). Agar tepat sasaran dan menjamin kebenaran data maka dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang ada di kabupaten/ kota. Rapat evaluasi ini diikuti oleh 57 orang peserta.

p) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Adapun kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- a. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri bagi korban HIV dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan keterampilan menyulam dan membuat *handycraft* dari barang-barang bekas tak terpakai untuk melatih korban HIV supaya dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan produktif. Bimbingan ini diikuti oleh 20 orang peserta.

- b. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV bagi PSKS

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PSKS tentang penanggulangan Narkoba serta memberikan pengetahuan terhadap pelajar

tentang bahaya narkoba dan penyakit HIV. Sasaran kegiatan ini sebanyak 150 orang penyuluh narkoba dan 57 orang bimtek HIV.

c. Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA

Rapat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan peserta tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diikuti oleh 55 orang peserta.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel A.2.1 halaman berikutnya.

Tabel A.1. Realisasi Program dan Kegiatan

No.	URAIAN	Anggaran	Bobot	REALISASI		
		Tahun ini	Fisik	Fisik	Keuangan	
		(Rp)	%	%	(Rp)	%
	BELANJA LANGSUNG	99.790.901.400	100,00	99,69	92.224.954.341	92,42
	BELANJA LANGSUNG UMUM	10.264.495.225	10,29	99,93	9.833.037.797	95,80
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.282.494.196	5,29	100,00	5.048.320.246	95,57
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	109.055.140	0,11	100,00	108.978.940	99,93
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	896.379.960	0,90	100,00	712.302.669	79,46
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	2.366.336.600	2,37	100,00	2.347.851.949	99,22
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	162.111.748	0,16	100,00	161.747.758	99,78
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.746.600	0,10	100,00	95.723.150	99,98
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	149.488.070	0,15	100,00	149.138.218	99,77
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	338.038.200	0,34	100,00	332.027.190	98,22
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	58.216.000	0,06	100,00	57.416.000	98,63
9	Penyediaan Bahan Logistik kantor	335.894.884	0,34	100,00	324.648.140	96,65
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar Daerah	464.902.973	0,47	100,00	464.208.232	99,85
11	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	37.770.021	0,04	100,00	34.590.000	91,58
12	Penyediaan Jasa Pembinaan	97.422.000	0,10	100,00	91.402.000	93,82

	Mental dan Fisik Aparatur					
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	171.132.000	0,17	100,00	168.286.000	98,34
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.381.311.384	3,39	99,82	3.258.821.141	96,38
1	Pengadaan Meubelier	216.000.000	0,22	100,00	215.350.455	99,70
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	247.000.000	0,25	100,00	244.378.950	98,94
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat Komunikasi dan Alat Informasi	12.450.000	0,01	100,00	12.450.000	100,00
4	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	419.040.000	0,42	100,00	417.274.320	99,58
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	419.071.584	0,42	100,00	371.182.522	88,57
6	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	76.510.000	0,08	100,00	76.469.353	99,95
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.148.000.000	1,15	100,00	1.126.682.000	98,14
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan	76.913.000	0,08	100,00	74.340.540	96,66
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	22.550.000	0,02	73,39	15.221.087	67,50
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	275.000.000	0,28	100,00	245.068.250	89,12
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	349.460.800	0,35	100,00	344.715.664	98,64
12	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	52.796.000	0,05	100,00	49.168.000	93,13
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen dan Bangunan Sejarah	66.520.000	0,07	100,00	66.520.000	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	151.200.000	0,15	100,00	122.018.900	80,70
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	151.200.000	0,15	100,00	122.018.900	80,70
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.266.000	0,06	100,00	54.359.100	94,92
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	57.266.000	0,06	100,00	54.359.100	94,92
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.392.223.645	1,40	99,95	1.349.518.410	96,93
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	318.265.395	0,32	100,00	314.632.920	98,86
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	583.290.250	0,58	100,00	575.898.650	98,73
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.051.400	0,04	100,00	38.051.400	100,00

4	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	132.989.050	0,13	100,00	132.476.202	99,61
5	Penyusunan Sinergitas Program antar Kab/Kota	111.629.750	0,11	100,00	111.541.750	99,92
6	Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian Aset SKPD	207.997.800	0,21	99,66	176.917.488	85,06
	BELANJA LANGSUNG WAJIB	89.526.406.175	89,71	99,66	82.391.916.544	92,03
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	293.159.750	0,29	99,85	235.279.450	80,26
1	Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	68.120.600	0,07	100,00	64.368.600	94,49
2	Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (ULS)	27.063.150	0,03	100,00	25.783.150	95,27
3	Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	128.303.500	0,13	99,66	76.365.200	59,52
4	Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)	69.672.500	0,07	100,00	68.762.500	98,69
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	6.907.798.435	6,92	99,99	6.808.100.117	98,56
1	Biaya Pendidikan Klien Tri Murni)	315.486.300	0,32	100,00	284.095.000	90,05
2	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	50.931.100	0,05	100,00	44.894.100	88,15
3	Pengadaan Kelengkapan Klien	924.063.625	0,93	100,00	906.461.500	98,10
4	Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	26.452.000	0,03	100,00	26.452.000	100,00
5	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung)	549.634.652	0,55	100,00	546.851.600	99,49
6	Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	45.530.000	0,05	100,00	42.817.415	94,04
7	Penyediaan Bahan Pendidikan (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung)	205.360.000	0,21	100,00	205.360.000	100,00
8	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	250.850.000	0,25	100,00	250.150.000	99,72
9	Rapat Koordinas Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak	160.536.500	0,16	100,00	156.474.500	
10	Pengadaan Makanan dan Minuman	3.125.711.688	3,13	100,00	3.124.986.368	99,98
11	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)	755.780.020	0,76	100,00	723.897.084	95,78
12	Sehari Bersama Anak	40.441.500	0,04	100,00	40.441.500	100,00
13	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Trimurni)	457.021.050	0,46	100,00	455.219.050	99,61
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	3.267.522.575	3,27	100,00	3.206.132.993	98,12
1	Penyediaan Bahan Obat-	21.601.800	0,02	100,00	21.576.500	99,88

	obatan dan Dokter Pakai Habis					
2	Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Kaya (LBK)	113.422.850	0,11	100,00	112.380.350	99,08
3	Biaya Kelengkapan Klien	272.755.479	0,27	100,00	271.760.000	99,64
4	Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli pada Penyandang Disabilitas	83.103.000	0,08	100,00	76.572.900	92,14
5	Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	733.732.779	0,74	100,00	698.145.300	95,15
6	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas	445.528.267	0,45	100,00	440.965.000	98,98
7	Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	22.130.130	0,02	100,00	22.130.100	100,00
8	Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	132.559.500	0,13	100,00	121.357.873	91,55
9	Pengadaan Makanan dan Minuman	1.442.688.770	1,45	100,00	1.441.244.970	99,90
9	Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	2.760.876.034	2,77	100,00	2.746.948.462	99,50
1	Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	67.973.900	0,07	100,00	67.973.900	100,00
2	Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien	37.000.000	0,04	100,00	37.000.000	100,00
3	Lanjut Usia Berkreasi	40.194.600	0,04	100,00	40.194.600	100,00
4	Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Jompo	647.933.476	0,65	100,00	637.670.484	98,42
5	Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo	395.190.420	0,40	100,00	393.623.600	99,60
6	Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	1.572.583.638	1,58	100,00	1.570.485.878	99,87
10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	904.957.700	0,91	99,76	903.682.156	99,86
1	Pengadaan Kelengkapan Klien	118.600.000	0,12	100,00	118.600.000	100,00
2	Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	22.492.000	0,02	100,00	22.492.000	100,00
3	Pengadaan Makanan dan Minuman	409.364.200	0,41	99,76	408.168.656	99,71
4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	354.501.500	0,36	100,00	354.421.500	99,98
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.815.873.972	10,84	97,35	9.307.887.224	86,06
1	Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	5.980.745.000	5,99	99,84	5.422.089.600	90,66
2	Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK)	87.181.000	0,09	100,00	86.224.000	98,90

	Berprestasi Tingkat Sumatera Barat					
3	Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat	50.798.000	0,05	100,00	50.798.000	100,00
4	Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	97.956.000	0,10	82,69	80.996.000	82,69
5	KSN Expo dan Award dalam HKS	22.106.000	0,02	71,08	10.183.500	46,07
6	Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	369.973.250	0,37	100,00	349.680.150	94,51
7	Penguatan Nilai-nilai KSN	133.730.200	0,13	100,00	133.730.200	100,00
8	Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	93.930.500	0,09	88,05	79.988.300	85,16
9	Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos	389.425.000	0,39	98,77	265.781.000	68,25
10	Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat	577.328.926	0,58	100,00	486.315.200	84,24
11	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	1.076.376.096	1,08	97,62	769.449.324	71,49
12	Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	54.550.000	0,05	100,00	54.550.000	100,00
13	Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	1.463.324.000	1,47	100,00	1.129.293.950	77,17
14	Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	361.578.000	0,36	100,00	340.976.000	94,30
15	Bimbingan Pengurus Organisasi se-Sumatera Barat	56.872.000	0,06	84,91	47.832.000	84,10
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	54.095.239.520	54,21	99,98	49.262.754.163	91,07
1	Penetapan calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	113.314.000	0,11	100,00	110.126.300	97,19
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	55.660.905	0,06	100,00	55.360.900	99,46
3	Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	105.283.000	0,11	100,00	95.547.200	90,75
4	Pelayanan Orang Terlantar	20.618.500	0,02	99,31	20.475.500	99,31
5	Sumbar Expo (Publikasi)	227.196.000	0,23	100,00	216.904.609	95,47
6	Bimbingan Pemantapan Pengurus LK 3	98.763.000	0,10	100,00	93.963.846	95,14
7	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi	52.322.000	0,05	100,00	52.322.000	100,00

	Komunitas Adat Terpencil (KAT)					
8	Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS	156.468.835	0,16	95,91	143.068.500	91,44
9	Sosialisasi Undian Berhadian Gratis (UGB)	53.545.000	0,05	100,00	46.605.000	87,04
10	Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	53.178.715.840	53,29	99,99	48.395.117.908	91,00
11	Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS	33.352.440	0,03	100,00	33.262.400	99,73
13	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	801.444.180	0,80	100,00	777.432.980	97,00
1	Bantuan Logistik Bencana	100.917.000	0,10	100,00	100.199.000	99,29
2	Rakor Bencana Bencana Sosial	83.593.000	0,08	100,00	81.893.000	97,97
3	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	66.363.400	0,07	100,00	66.363.400	100,00
4	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	82.829.200	0,08	100,00	81.843.250	98,81
5	Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan	60.535.980	0,06	100,00	60.532.980	100,00
6	Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	85.041.200	0,09	100,00	85.040.950	100,00
7	Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	78.291.400	0,08	100,00	78.287.400	99,99
8	Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	122.101.500	0,12	100,00	111.701.500	91,48
9	Peningkatan Capacity Building Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	121.771.500	0,12	100,00	111.571.500	91,62
14	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	9.392.123.209	9,41	99,95	8.858.969.394	94,32
1	Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	114.246.000	0,11	90,04	98.552.800	86,26
2	Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	2.443.441.300	2,45	100,00	2.443.176.300	99,99
3	Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	119.553.309	0,12	94,43	93.972.500	78,60
4	Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	233.312.700	0,23	100,00	179.253.100	76,83
5	Bantuan Pengembangan E-Warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	3.856.098.900	3,86	99,94	3.731.915.200	96,78
6	Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	328.346.200	0,33	100,00	297.238.550	90,53
7	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan	195.735.300	0,20	100,00	143.279.900	73,20

	RASTRA tahun 2019					
8	Bantaun Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	1.908.675.500	1,91	100,00	1.698.453.044	88,99
9	Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	86.879.900	0,09	100,00	81.934.600	94,31
10	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota	105.834.100	0,11	100,00	91.193.400	86,17
15	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	287.410.800	0,29	100,00	284.729.605	99,07
1	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	77.454.000	0,08	100,00	77.454.000	100,00
2	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penangan HIV bagi PSKS	150.757.300	0,15	100,00	149.557.300	99,20
3	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	59.199.500	0,06	100,00	57.718.305	97,50
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	99.790.901.400	100,00	99,69	92.224.954.341	92,42

B. Outcome Program

Tabel A.2. Output dan Outcome

No.	URAIAN	Outcome	Output		
			Kualitatif	Kuantitatif	
				Target	Fisik %
I	BELANJA LANGSUNG				99,69
I	BELANJA LANGSUNG UMUM				99,93
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Sosial dan 8 UPTD.	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	1 tahun	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air bersih, listrik dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	1 tahun	100,00

		perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPTD.			
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor Dinas dan 8 UPTD	Terlaksananya Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	1 tahun	100,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya administrasi perkantoran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan 8 UPTD.	Tersedianya alat tulis kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	1 tahun	100,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya administrasi perkantoran Dinas Sosial dan UPTD.	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan di Dinas Sosial dan 8 UPTD.		100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD.	1 tahun	100,00
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor Dinas dan 8 UPTD	Terlaksananya peralatan rumah tangga kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	1 tahun	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Meningkatnya pengetahuan umum aparatur di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	1 tahun	100,00
9	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor di Dinas dan 8 UPTD	Tersedianya bahan logistik kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	1 tahun	100,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar Daerah	Terjalannya koordinasi pelaksanaan tupoksi dan pelayanan Dinas Sosial dengan baik	Terlaksananya rapat koordinasi Dinas Sosial dengan instansi terkait dan vertikal secara baik	1 tahun	100,00
11	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terinformasikan dan terpublikasikannya kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan UPTD kepada masyarakat luas	Terlaksananya Jasa Informasi, Publikasi, dan Dinas Sosial dan 8 UPTD	1 tahun	100,00
12	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terpenuhinya kesehatan, mental, spiritual aparat Dinas Sosial dan 8 UPTD	Terlaksananya kesehatan, mental, spiritual aparat Dinas Sosial dan 8 UPTD	1 tahun	100,00

13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu dalam rangka rapat koordinasi	Terlaksananya makan minum rapat dan tamu dalam rangka rapat koordinasi.	1 tahun	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				99,82
1	Pengadaan Meubelier	Terpenuhinya meubeler kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	Terlaksananya penyediaan meubeler di Dinas Sosial dan 8 UPTD	91 unit	100,00
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpenuhinya komputer dan jaringan komputerisasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Sosial dan 8 UPTD	Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD	35 unit	100,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat Komunikasi dan Alat Informasi	Terpenuhinya alat studio, alat komunikasi dan alat informasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam keadaan baik.	Terlaksananya pemeliharaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	30 unit	100,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya gedung kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam kondisi baik.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	2 gedung, 3 pembatas shaf mushala, penggantian instalasi dan jaringan listrik, dan pembuatan sumur bor	100,00
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya ketersediaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam kondisi baik.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	37 unit	100,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpenuhinya ketersediaan komputer & jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam keadaan baik.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer & jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD.	145 unit	100,00
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya ketersediaan gedung kantor dalam keadaan baik dan	Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	7 unit	100,00

		kondusif.			
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpenuhinya instalasi listrik, telepon, dan air dalam kondisi baik di Dinas Sosial dan 8 UPTD	Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air di Dinas Sosial dan 8 UPTD	12 bulan	100,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya ketersediaan kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon II di Dinas Sosial dalam keadaan baik.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon II di Dinas Sosial	1 unit	73,39
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya ketersediaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD sesuai kebutuhan.	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di Dinas Sosial dan 8 UPTD sesuai kebutuhan.	5 unit sepeda motor	100,00
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD sesuai kebutuhan.	Terlaksananya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	161 unit	100,00
12	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD dalam kondisi baik.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD	187 unit	100,00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen dan Bangunan Sejarah	Terpenuhinya kondisi taman makam pahlawan yang baik	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan Sumatera Barat	1 unit	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai dan PTT Dinas Sosial sesuai ketentuan.	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	280 stel	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100,00
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan teknis implementasi peraturan perundang-undangan pegawai dinas sosial dan UPTD perundang-	Dapat diikutsertakan para pegawai pada bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 orang	100,00

		undangan			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				99,95
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terpenuhinya rencana program dan kegiatan dinas sosial	Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan dinas sosial	6 dokumen	100,00
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan Dinas Sosial dan UPTD	Terlaksananya penyediaan honorarium pengelola keuangan Dinas Sosial dan UPTD	12 bulan	100,00
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja Dinas Sosial	Telaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dinas sosial	6 dokumen	100,00
4	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Terpantau dan terawasinya pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	8 UPTD dan Panti Sosial di 19 Kab/Kota	100,00
5	Penyusunan Sinergitas Program antar Kab/Kota	Adanya sinergisitas program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi dengan kab/Kota	Terlaksananya Sinergisitas Program antar Kab/Kota	85 orang	100,00
6	Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian Aset SKPD	Meningkatnya kinerja pengelola aset Dinas Sosial dan UPTD	Terlaksananya penyediaan honorarium pengelola aset Dinas Sosial dan UPTD	12 bulan	99,66
II	BELANJA LANGSUNG WAJIB				99,66
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				99,85
1	Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	Meningkatnya kapasitas dan kinerja Satuan Bhakti Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan KSA	Terlaksananya Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial dari Kab/Kota	50 orang	100,00
2	Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (ULS)	Meningkatnya pemahaman petugas Dinas Sosial Kab/Kota dan Mitra Kerja terntang kegiatan ULS	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (ULS) kepada petugas Kab/Kota	60 orang	100,00

3	Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap klien penyandang disabilitas (ODK) dari Prov.Sumatera Barat ke Panti Rujukan Rehabilitas Sosial	Terlaksananya koordinasi dan pengiriman penyandang disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi sosial di Panti Sosial Rujukan	12 orang	99,66
4	Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)	Meningkatnya pemahaman petugas Dinas Sosial Kab/Kota dan Mitra Kerja terntang ABH	Terlaksananya Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) kepada petugas Kab/Kota	50 orang	100,00
7	Program Pembinaan Anak Terlantar				99,99
1	Biaya Pendidikan Klien Tri Murni)	Terpenuhinya pendidikan anak terlantar yang direhabilitasi di PSAA Tri Murni	Tersedianya biaya pendidikan anak terlantar yang direhabilitasi di PSAA Tri Murni	100 orang (perempuan)	100,00
2	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	Terseleenggaranya persidangan untuk pengangkatan anak terlantar	Terlaksananya sidang Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	25 orang	100,00
3	Pengadaan Kelengkapan Klien	Terpenuhinya kelengkapan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang	Tersedianya kelengkapan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang	355 orang (155 laki-laki dan 200 perempuan)	100,00
4	Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi di dalam panti	Terlaksananya Penyediaan Obat-obatan dan Jasa Dokter	12 bulan	100,00
5	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung)	Terpenuhinya pelayanan pendidikan bagi anak terlantar di PSABR Budi Utama Lubuk Alung	Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar di PSAABR Budi Utama	160 orang (laki-laki); jurusan otomotif, elektro, instalasi listrik, dan las listrik/karbit	100,00
6	Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	Terpenuhi Seleksi Penerimaan Calon Kelayan yang akan	Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	65 orang	100,00

		mengikuti rehabilitasi sesuai ketentuan			
7	Penyediaan Bahan Pendidikan (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung)	Terpenuhinya bahan pendidikan kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	Terlaksananya bahan Pendidikan Kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	75 orang	100,00
8	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	Terpenuhinya bahan pendidikan kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	Terlaksananya bahan Pendidikan Kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	75 rang (laki-laki)	100,00
9	Rapat Koordinas Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak	Terjalinnnya koordinasi antar pengurus panti sosial swasta dengan petugas sosial kab/ kota tentang penanganan perlindungan anak	Terlaksananya rapat koordinasi tentang rehabilitasi sosial anak	125 orang	100,00
10	Pengadaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya pelayanan permakanan dan perminuman bagi anak terlantar di PSBR Harapan, PSAA Tri Murni, dan PSAABR Budi Utama	Terlaksananya Pengadaan Makanan dan Minuman bagi anak terlantar di PSBR Harapan, PSAA Tri Murni, dan PSAABR Budi Utama	355 orang (155 laki-laki dan 200 perempuan)	100,00
11	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)	Terpenuhinya pelayanan pendidikan bagi anak terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang	Terlaksananya pelatihan keterampilan Kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	200 orang (Perempuan)	100,00
12	Sehari Bersama Anak	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar	Terlaksananya penyelenggaraan sehari bersama anak	200 orang	100,00
13	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Trimurni)	Terpenuhinya pelayanan pendidikan bagi kelayan PSAA Tri Murni	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni)	100 orang (Perempuan)	100,00
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma				100,00
1	Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi kelayan tuna netra di PSBN Tuah Sakato Padang	12 bulan	100,00
2	Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Kaya (LBK)	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksana Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Kaya (LBK)	15 orang	100,00

3	Biaya Kelengkapan Klien	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kelayan di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang	Terlaksananya pengadaan biaya kelengkapan kelayan	150 orang (92 laki-laki, 58 perempuan)	100,00
4	Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli pada Penyandang Disabilitas	Meningkatnya kepedulian masyarakat kepada Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli pada Penyandang Disabilitas	54 orang	100,00
5	Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	Meningkatnya keberfungsian sosial para Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	100 orang	100,00
6	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi kelayan tuna netra di PSBN Tuah Sakato Padang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	50 orang	100,00
7	Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Meningkatnya keberfungsian sosial para Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	1 kegiatan	100,00
8	Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	Meningkatnya kapasitas dan motivasi PSM/TKSK	Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	68 orang	100,00
9	Pengadaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang	Terlaksananya biaya makan dan minum kelayan penyandang cacat dalam panti	150 orang	100,00
9	Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar				100,00
1	Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	Terlaksananya pengadaan Obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	12 bulan	100,00
2	Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien	Terpenuhinya pemakaman dan pemulangan kelayan kepada keluarganya	Terlaksananya jasa pemakaman dan pemulangan kelayan	12 bulan	100,00
3	Lanjut Usia Berkreasi	Meningkatnya kepedulian masyarakat luas terhadap lanjut usia	Terlaksananya kegiatan lanjut usia berkreasi	250 orang	100,00
4	Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Jompo	Meningkatnya kemandirian lanjut usia di PSTW Sabai nan aluih sicincin dan PSTW Kasih Sayang Cubadak	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni Panti Jompo	180 orang	100,00

5	Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo	Terpenuhinya kelengkapan kelayan di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu	Terlaksananya pengadaan bahan kelengkapan kelayan lanjut usia di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu	180 orang	100,00
6	Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	Terpenuhinya Kebutuhan Makan kelayan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih	Terlaksananya pengadaan makan dan minum kelayan jompo di PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	180 orang	100,00
10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)				99,76
1	Pengadaan Kelengkapan Klien	Terpenuhinya kelengkapan eks tuna susila PSKW Andam Dewi Solok	Terlaksananya pengadaan kelengkapan klien	40 orang	100,00
2	Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terpenuhinya obat-obatan kelayan eks tuna susila PSKW Andam Dewi Solok	Terlaksananya pengadaan obat-obatan	12 bulan	100,00
3	Pengadaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan pangan klien eks tuna susila pada PSKW Andam Dewi Solok	Terlaksananya pengadaan makan dan minuman bagi eks tuna susila	40 orang	99,76
4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi kelayan eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha eks penyandang penyakit sosial	40 orang	100,00
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				97,35
1	Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Meningkatnya kapasitas Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Terlaksananya Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	1.811 orang	99,84
2	Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tingkat Sumatera Barat	Termotivasinya para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	Terlaksananya penilaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berprestasi tingkat Sumatera Barat	32 orang	100,00

3	Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat	Termotivasinya Pekerja Sosial Masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat	50 orang	100,00
4	Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	Meningkatnya kapasitas TKSK se-Sumatera Barat	Terlaksananya Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	50 orang	82,69
5	KSN Expo dan Award dalam HKS	Terpublikasikannya kepada masyarakat umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan dan terjalannya koordinasi dengan mitra kerja pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial	Dapat ikut sertakannya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan pameran Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Expo dan Award	1 kegiatan	71,08
6	Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Meningkatnya kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	Terlaksananya Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	165 orang	100,00
7	Penguatan Nilai-nilai KSN	Terpenuhinya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)	Terlaksananya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)	1 kegiatan	100,00
8	Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	Termotivasinya Pengurus Organisasi Sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kesiapan akreditasi	Terlaksananya Bimbingan Jejaring Kerja LKS / Orsos se Sumatera Barat Dalam Rangka Akreditasi	50 orang	88,05
9	Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos	Termotivasinya pengurus posdaya dalam penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya penguatan peran LKS Posdaya	640 orang	98,77
10	Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat	Termotivasinya pengurus LKKS Provinsi dan Kab/Kota dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kegiatan sosial	Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan LKKS provinsi dan kab/kota Sumatera Barat	180 orang	100,00
11	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Terinformasikannya program pembangunan	Terlaksananya penyuluhan sosial melalui berbagai media	3.260 orang	97,62

		kesejahteraan sosial kepada masyarakat			
12	Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	Termotivasinya Pengurus Karang Taruna untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	50 orang	100,00
13	Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Meningkatnya kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	Terlaksananya Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	685 orang	100,00
14	Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Termotivasinya Pilar Kesejahteraan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya Penguatan Peran Pilar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	180 orang	100,00
15	Bimbingan Pengurus Organisasi se-Sumatera Barat	Termotivasinya pengurus organisasi sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	Terlaksananya bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se Sumatera Barat	50 orang	84,91
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				99,98
1	Penetapan calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Adanya rekomendasi calon lokasi Pemberdayaan KAT	Terlaksananya penetapan calon lokasi Pemberdayaan KAT	1 rekomendasi	100,00
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Diperolehnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial dan UPTD	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 rekomendasi	100,00
3	Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	Diusulkannya calon pahlawan dari Sumbar	Terlaksananya Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	3 orang	100,00
4	Pelayanan Orang Terlantar	Terpenuhinya pelayanan terhadap orang terlantar di Sumbar	Terlaksananya Pelayanan Orang Terlantar	38 orang	99,31

5	Sumbar Expo (Publikasi)	Terpublikasikannya kepada masyarakat umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan dan terjalannya koordinasi dengan mitra kerja pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial	Terlaksananya Sumbar Expo (Publikasi)	1 kegiatan	100,00
6	Bimbingan Pemantapan Pengurus LK 3	Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme pengurus LK3 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pengurus LK3 di 19 Kab/Kota	50 orang	100,00
7	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan warga Komunitas Adat terpencil dalam pengembangan usahanya	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil	30 KK	100,00
8	Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS	Meningkatnya kemampuan Petugas Pendata PMKS dalam mengumpulkan data PMKS	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS	96 orang	95,91
9	Sosialisasi Undian Berhadian Gratis (UGB)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Undian Berhadian Gratis (UGB)	Terlaksananya Sosialisasi Undian Berhadian Gratis (UGB)	25 orang	100,00
10	Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Meningkatnya kesejahteraan keluarga rentan dan wanita usaha bersama rawan sosial ekonomi (WRSE)	Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	15,890 orang	99,99
11	Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS	Terpenuhinya penyediaan data PMKS untuk penyusunan program	Terlaksananya Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS	1 kegiatan	100,00
13	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial				100,00
1	Bantuan Logistik Bencana	Terpenuhinya persediaan logistik bencana	Terlaksananya Bantuan Logistik Bencana	1 kegiatan	100,00
2	Rakor Bencana Sosial	Terbangunnya koordinasi yang kuat dalam penanganan bencana sosial	Terlaksananya Rakor Bencana Sosial	59 orang	100,00

3	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	Meningkatnya kemampuan petugas dalam Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	45 orang	100,00
4	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	Meningkatnya kemampuan petugas dalam Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	60 orang	100,00
5	Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan	Terbangunnya koordinasi yang kuat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan	35 orang	100,00
6	Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	Meningkatnya kemampuan Tim TRC dalam penanganan bencana alam	Terlaksananya Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	50 orang	100,00
7	Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	Meningkatnya kemampuan Tim Psikososial dalam penanganan bencana alam	Terlaksananya Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	50 orang	100,00
8	Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbangunnya sinergi yang efektif dalam penanganan bencana sosial	Terlaksananya Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	76 orang	100,00
9	Peningkatan Capacity Building Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya kapasitas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan pelayanan	Terlaksananya Peningkatan Capacity Building Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	76 orang	100,00
14	Program Pemberdayaan Fakir Miskin				99,95
1	Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	Keningkatnya kapasitas dan kinerja Petugas Verifikasi dalam melaksanakan pendataan BDT	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	57 orang	90,04
2	Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	Terpenuhinya pemberian kebutuhan pangan beras bagi kelayan dalam panti sosial swasta se Sumatera Barat	Terlaksananya Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	121 panti swasta (4.000 orang)	100,00
3	Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Keningkatnya kapasitas dan kinerja pendamping BPNT dalam memberikan pendampingan	Terlaksananya Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	60 orang	94,43

4	Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	Keningkatnya Motivasi KUBE dan pendamping KUBE untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok	Terlaksananya Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	38 orang	100,00
5	Bantuan Pengembangan E-Warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	Meningkatnya kesejahteraan kelompok melalui Kelompok Usaha Bersama	Terlaksananya Bantuan Pengembangan E-Warung KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	167 kelompok	99,94
6	Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	Meningkatnya kesejahteraan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan melalui Kelompok Usaha Bersama	Terlaksananya Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	8 kelompok	100,00
7	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan RASTRA tahun 2019	Terantau dan terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan BPNT/Rastra	Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan RASTRA	50 orang	100,00
8	Bantaun Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	Meningkatnya kesejahteraan Fakir Miskin Pedesaan melalui Kelompok Usaha Bersama	Terlaksananya Bantaun Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	73 kelompok (730 kk)	100,00
9	Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	Keningkatnya kapasitas dan kinerja pendamping KUBE dalam memberikan pendampingan	Terlaksananya Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	50 orang	100,00
10	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota	Terpantaunya pelaksanaan verifikasi dan validasi data BDT Kab/ Kota	Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota	57 orang	100,00
15	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba				100,00
1	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	Meningkatnya kepercayaan diri korban HIV	Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	20 orang	100,00
2	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penangan HIV bagi PSKS	Meningkatnya pengetahuan PSKS/ Masyarakat tentang penanggulangan narkoba dan PMS	Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penangan HIV bagi PSKS	150 penyuluh narkoba; 57 bimtek HIV	100,00
3	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	Meningkatnya pengetahuan peserta tentang penanganan penyalahgunaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan	55 orang	100,00

		NAPZA	Napza		
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				99,69

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah

MISI 4 : MEWUJUDKAN EKONOMI PRODUKTIF DAN MAMPU BERSAING DI DUNIA GLOBAL

TUJUAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				PROYEKSI		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
				2016	2017	2018	2019	2021-2025		
								TARGET AWAL	TARGET AKHIR	
5. Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Menurunnya Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS	Orang	5.334	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	Menurunnya Penduduk Miskin, Pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

MISI 5 : MEWUJUDKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DENGAN PENGELOLAAN SDA BERKELANJUTAN

TUJUAN	SASARAN POKOK	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				PROYEKSI		ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
				2016	2017	2018	2019	2021-2025		
								TARGET AWAL	TARGET AKHIR	
3. Meningkatkan Budaya dan Perilaku Masyarakat Yang Tanggap Bencana	Meningkatnya Penanganan Tangap Darurat dan Pemulihan Wilayah/Daerah Pasca Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Bisa Di Tangani sesuai Standar Kapasitas Penanggulangan Bencana	%	17,60%	1,64%	25,27%	12,71%	17,18%	17,18%	Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Penanganan Bencana

D. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan serta fisik kegiatan dapat terealisasi sesuai target. Namun, dari 14 program dan 119 kegiatan, terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik tidak mencapai 100% yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Pada kegiatan ini honor tidak dibayarkan untuk relawan penyuluh sosial dikarenakan pertimbangan bahwa relawan belum melakukan kegiatan penyuluhan di lapangan. Efisiensi dana pakaian kerja lapangan.

2. Kegiatan Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan: Dalam pagu murni penggantian transport peserta indeksnya tidak sesuai dengan Pergub, telah diajukan pada anggaran perubahan namun tidak terakomodir, maka hanya dapat dilakukan untuk 5 lokasi saja.
3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan LKKS: Terjadi silpa perjadiin Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial, yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2020 karena pemerintah Gorontalo tidak menyediakan anggaran pendukung.

b) Solusi

Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kegiatan ini kembali diusulkan Tahun Anggaran 2020 dengan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

E. Penghargaan Nasional yang Diterima

Penghargaan nasional yang diterima pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan dari Menteri Sosial RI sebagai Terbaik II Capaian Program Penangan Fakir Miskin tahun 2019 Tingkat Nasional;
2. Penghargaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan Nasional Peringkat III.

F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018

No	Rekomendasi	SKPD Terkait	Tenggang Waktu	Tindak Lanjut
1	Urusan Sosial			
	Rekomendasi terhadap pelaksanaan Urusan Sosial sebagai berikut :			
	1. Pelaksanaan kegiatan KUBE sebaiknya dilaksanakan secara terpadu dengan OPD terkait, sehingga dapat lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap anggota	DINAS SOSIAL	Tahun Anggaran 2020	Seluruh bantuan KUBE yang diserahkan kepada masyarakat telah sesuai dengan permintaan masing-masing anggota KUBE dengan berpedoman kepada RUKU

		KUBE tersebut, terutama untuk meningkatkan pendapatannya.			(Rencana Usulan Kebutuhan Usaha);
	2.	Dinas Sosial dengan melibatkan OPD terkait, perlu memberikan pendampingan terhadap kegiatan Anggota KUBE, agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal.	DINAS SOSIAL	Tahun Anggaran 2020	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif KUBE telah diselenggarakan dari tahun 2007 dan dalam pelaksanaan kegiatan KUBE Dinas Sosial telah merekrut sumber daya manusia yang profesional dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis oleh Kementerian Sosial RI, SDM tersebut ditunjuk sebagai tenaga pendamping dalam optimalisasi pemanfaatan bantuan UEP KUBE;
	3.	Data-data Kemiskinan perlu di Update secara terus menerus sehingga dapat menjadi valid dan akuntabel. Tanpa dukungan data-data yang valid dan akuntabel, maka sulit untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan hasil pelaksanaan kegiatan pun tidak akan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.	DINAS SOSIAL	Tahun Anggaran 2020	Data kemiskinan telah diakomodir oleh Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI. Updating data kemiskinan dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan 2 kali dalam satu tahun (bulan April dan November), yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kota sesuai dengan Permensos No.13 tahun 2011 tentang "PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU";
	4	Untuk penyelesaian permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Daerah tidak bisa menjadikan alasan urusan kewenangan untuk tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan sosial tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut.	DINAS SOSIAL	Tahun Anggaran 2020	Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan antara Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan telah memenuhi indikator-indikator permasalahan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi tanggung jawab bersama.

	5	Pemerintah Daerah bersama-sama dengan 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten terkait serta Pemerintah Pusat, perlu merumuskan kebijakan dan langkah-langkah konkrit untuk mengeluarkan 3 (tiga) Daerah Kabupaten tersebut dari kelompok Daerah Tertinggal. Harus ada dukungan program/kegiatan dan anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk 3 (tiga) Daerah tersebut.	DINAS SOAIAL	Tahun Anggaran 2020		Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir program/kegiatan dan anggaran terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya baik melalui dana APBD maupun APBN, namun untuk Kab.Pasaman Barat dan Kab. Solok Selatan tidak termasuk dalam kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT) sesuai Perpres No.9 tahun 2011 dan tidak masuk dalam database Kemensos RI.
Rekomendasi Fraksi Partai Gerindra						
	1	Pembenahan di Dinas Sosial dilakukan guna mengurangi kemiskinan guna menghilangkan status Daerah Tertinggal yang masih terdata di Provinsi Sumbar. Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten yang masih tertinggal itu, harus punya target, kapan status Daerah Tertinggal itu bisa dihilangkan. Khusus data kemiskinan yang berpedoman kepada Basis Data Terpadu (BDT), harus ada upaya secara terus menerus terhadap UpDate (pembaharuan) data BDT tersebut, sehingga data tersebut menjadi valid dan akuntabel, dan ketika dilakukan pemberian bantuan, menjadi tepat sasaran bagi penerima manfaat.	DINAS SOSIAL	Tahun Anggaran 2021	1	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir program/kegiatan dan anggaran terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya baik melalui dana APBD maupun APBN, namun untuk Kab.Pasaman Barat dan Kab. Solok Selatan tidak termasuk dalam kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT) sesuai Perpres No.9 tahun 2011 dan tidak masuk dalam database Kemensos RI. Untuk itu perlu koordinasi komprehensif dengan Kementerian Sosial RI.
			DINAS SOSIAL	Tahun Anggaran 2020	2	Data kemiskinan telah diakomodir oleh Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI. Updating data kemiskinan dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan 2 kali dalam satu tahun (bulan April dan November), yang

					<p>dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kota sesuai dengan Permensos No.13 tahun 2011 tentang "PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU" . Kemudian koordinasi terkait verifikasi dan validasi akan terus dilakukan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota karena yang melakukan verifikasi dan validasi diserahkan ke Kabupaten/Kota.</p>
Rekomendasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera					
1	<p>Agar kegiatan-kegiatan pada Dinas Sosial terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti KUBE agar lebih dikelola secara profesional.</p>	DINAS SOSIAL	Tahun Anggaran 2020	<p>Kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama pemberian bantuan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya PMKS akan lebih ditingkatkan serta dikelola dengan maksimal mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pemetaan sumber daya dan tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang profesional, dan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan tersebut.</p>	

BAB II
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN DEKONSENTRASI

A. Tugas Pembantuan yang diterima

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- b) DIPA Kementerian Sosial RI Nomor : SP DIPA- 027.03.4.089141/2019

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

3. Satuan Kerja Perangkat daerah yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Sosial RI tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya.

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan :

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memberikan Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial bagi 100 KK warga KAT di Dusun Matektek, memberikan Bantuan Jaminan Hidup Tahun I untuk 100 KK di Dusun Matektek, memberikan Bantuan Peralatan (kerja & rumah tangga) dan bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan bagi 100 KK warga KAT di Dusun Matektek, serta menyediakan infrastruktur berupa Balai Sosial bagi warga KAT di Dusun Matektek, dan memberikan Bantuan Jaminan Hidup Tahun II untuk 93 KK di Dusun Sirua Monga.

5. Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran Tugas Pembantuan tahun 2019 sebesar : **Rp. 3.834.690.000,-**

6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Program Pemberdayaan Sosial sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Sub Kegiatan yang dilaksanakan:
- 1) Pembangunan Rumah Sederhana bagi Warga KAT sebanyak 100 Unit di Dusun Matektek;
 - 2) Bantuan Pembangunan 1 unit Balai Sosial di Dusun Matektek;
 - 3) Bantuan Jaminan Hidup Tahun I bagi Warga KAT untuk 100 KK di Dusun Matektek;
 - 4) Bantuan Bibit Tanaman bagi Warga 100 Paket di Dusun Matektek;
 - 5) Bantuan Peralatan Kerja bagi Warga, 10 Paket di Dusun Matektek;
 - 6) Bantuan Peralatan Rumah Tangga untuk 100 Paket di Dusun Matektek;
 - 7) Bantuan Jaminan Hidup Tahun II bagi Warga KAT untuk 93 KK di Dusun Sirua Monga.

Realisasi Fisik Kegiatan = Rp. 3.834.490.000,- (100%) dan Realisasi Keuangan sebesar = Rp. 3.497.664.000,- (91,21%).

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Kegiatan Tugas Pembantuan yang sifatnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hanya sebagai pelaksana, petunjuk kegiatan dan kerangka acuan di buat oleh Kementerian Sosial.

Untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2019 secara prinsip tidak terdapat permasalahan, semua kegiatan dapat berjalan sesuai waktunya dan rencana yang telah ditetapkan.

B. PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSETRASI

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

- c) Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- e) DIPA Kementerian Sosial RI Nomor :
 - 1) SP DIPA- 027.01.3.080038/2019
 - 2) SP DIPA- 027.03.3.089029/2019
 - 3) SP DIPA- 027.04.3.089030/2019
 - 4) SP DIPA- 027.05.3.089031/2019
 - 5) SP DIPA- 027.06.3.418958/2019

b. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi

Dana dekonsentrasi yang diterima berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, dengan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dilaksanakan oleh Sekretariat;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 3) Program Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 5) Program Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada Tahun 2019, Dinas Sosial memperoleh anggaran APBN yang bersumber dari dana dekonsentrasi Kementerian Sosial dengan total anggaran sebesar Rp16.239.098.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.988.304.300,00 (98,46%).

e. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Adapun program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp258.419.000,00 realisasi sebesar Rp245.308.200,00 (94,93%). Output kegiatan adalah Layanan Perencanaan;
2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan anggaran sebesar Rp2.922.500.000,00 realisasi sebesar Rp2.904.893.500,00 (99,40%). Output kegiatan adalah :
 - a) Orang atau pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, serta TMPN/TMP/MPN yang direhab dan dipelihara sebanyak 4 unit;
 - b) PSKS Perorangan yang mendapatkan pemberdayaan, PSKS Lembaga yang mendapatkan pemberdayaan, Layanan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, dan Layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c) Layanan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil (PKAT);
 - d) Layanan pengelolaan sumber dana bantuan sosial (PSDBS).
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial dengan anggaran Rp284.040.000,00 dan

realisasi sebesar Rp268.800.000,00 (94,63%). Output kegiatan ini adalah:

a) Komunitas yang mendapatkan layanan penyuluhan sosial.

4. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp2.436.923.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.245.138.500,00 (92,13%). Output dari kegiatan ini adalah:

a) Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;

b) Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;

c) Tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;

d) Anak balita terlantar, anak terlantar/ anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial; Kabupaten/ Kota yang mengembangkan pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI), dan

e) Lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial dan Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan Home Care.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp6.518.020.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.509.448.600,00 (99,87%). Output dari kegiatan ini adalah:

a) Kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat di lokasi rawan bencana;

b) Korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar;

c) Keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat.

6. Program Penanganan Fakir Miskin dengan anggaran sebesar Rp3.819.196.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.814.715.500,00 (99,88%). Output dari kegiatan ini adalah:

a) KPM yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif;

f. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan Tugas Deskonsentrasi yang sifatnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hanya sebagai pelaksana, petunjuk kegiatan dan kerangka acuan di buat oleh Kementerian Sosial.

Untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Dekonsentrasi tahun 2019 secara prinsip tidak terdapat permasalahan, semua kegiatan dapat berjalan sesuai waktunya dan rencana yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Program kesejahteraan sosial dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini diemban oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat karena urusan sosial merupakan urusan yang menyangkut kepada pelayanan dasar terhadap masyarakat, khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Begitu juga dengan telah diterbitkannya regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Program pembangunan kesejahteraan sosial yang dirancang dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, pada tahun 2019 ini telah berjalan untuk tahun ke-4. Hasil yang dicapai dari program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial telah dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial kelompok masyarakat sasaran yang sangat rentan.

B. SARAN

- 1) Koordinasi dengan Kab/Kota terkait *updating* data PMKS sebagai dasar penyusunan program/kegiatan baik dari dana dekonsentrasi maupun dana desentralisasi, hal ini diharapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan sasaran.
- 2) Perlunya optimalisasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Padang, Januari 2020

Kepala Dinas

JUMAI, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19670817 200003 1 006